



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan Covid-19 menuju New Normal di Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desase 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-10) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 90)

sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Anggaran Pendapatan pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp3.129.412.939.000,00 berkurang sebesar (Rp235.842.824.335,00) sehingga menjadi sebesar Rp2.893.570.114.665,00
2. Ketentuan dalam Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp3.270.994.179.000,00 berkurang sebesar (Rp239.784.895.837,00) sehingga menjadi sebesar Rp3.031.209.283.163,00
3. Ketentuan dalam Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp141.581.240.000,00 berkurang sebesar (Rp3.942.071.502,00) sehingga menjadi sebesar Rp137.639.168.498,00
4. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Sebagian ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



6. Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1, 2, dan angka 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Dalam hal ada kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang tidak dapat terbayarkan akibat refocusing anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka akan dibayarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	3.129.412.939.000,00	2.893.570.114.665,00	(235.842.824.335,00)	(7,54)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	398.649.681.000,00	340.045.868.000,00	(58.603.813.000,00)	(14,70)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	109.120.000.000,00	98.208.000.000,00	(10.912.000.000,00)	(10,00)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.119.065.000,00	13.695.252.000,00	(3.423.813.000,00)	(20,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.050.000.000,00	6.345.000.000,00	(705.000.000,00)	(10,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	265.360.616.000,00	221.797.616.000,00	(43.563.000.000,00)	(16,42)
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.884.536.404.000,00	1.708.332.939.265,00	(176.203.464.735,00)	(9,35)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.172.349.000,00	40.640.200.265,00	8.467.851.265,00	26,32
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.381.401.958.000,00	1.261.293.035.000,00	(120.108.923.000,00)	(8,69)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	470.962.097.000,00	406.399.704.000,00	(64.562.393.000,00)	(13,71)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	846.226.854.000,00	845.191.307.400,00	(1.035.546.600,00)	(0,12)
1.3.1	Pendapatan Hibah	160.060.480.000,00	180.135.800.000,00	20.075.320.000,00	12,54
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	190.532.226.000,00	171.479.003.400,00	(19.053.222.600,00)	(10,00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.098.000.000,00	1.098.000.000,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	495.634.148.000,00	492.478.504.000,00	(3.155.644.000,00)	(0,64)
2	BELANJA	3.270.994.179.000,00	3.031.209.283.163,00	(239.784.895.837,00)	(7,33)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.869.441.738.000,00	2.019.015.893.423,00	149.574.155.423,00	8,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.097.880.031.000,00	1.088.646.825.820,00	(9.233.205.180,00)	(0,84)
2.1.2	Belanja Bunga	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	45.276.400.000,00	42.835.100.000,00	(2.441.300.000,00)	(5,39)